

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indikator keberhasilan dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan berkurangnya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan suatu daerah. Pembangunan ekonomi dapat dilihat seperti suatu mekanisme dimana dampaknya adalah multidimensi yang mencakup berbagai perubahan dalam urutan sosial, sikap masyarakat dan pemerintahan. Strategi pembangunan ekonomi tidak hanya tentang bagaimana mengupayakan akselerasi pertumbuhan ekonomi atau Produk Nasional Bruto (PNB) saja, tetapi juga mengupayakan secara langsung terkait dengan peningkatan tingkat kehidupan masyarakat yang sempat terabaikan selama tiga dekade karena terlalu mengutamakan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan (C.Smith, 2003).

Fenomena ketimpangan pendapatan perlu menjadi fokus utama dalam menetapkan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Kualitas penduduk diharapkan juga ikut diperbaiki dalam perbaikan kesejahteraan ekonomi. Diantaranya dengan merenovasi dan mengatasi permasalahan dalam pemerataan distribusi pendapatan antar masyarakat. Usaha dari berbagai pihak sangat diperlukan guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi dan masyarakat.

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan pendapatan adalah topik yang harus dihadapi dan diatasi. Karena apabila ketimpangan dalam distribusi pendapatan suatu negara atau wilayah tidak diatasi akan menyebabkan disparitas

antar daerah. Bahkan bukan hanya di negara berkembang, adapun di negara maju pun dua hal tersebut adalah masalah yang masih juga sering dihadapi. Masalah dalam ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat memiliki 2 aspek, yang pertama yaitu cara menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat golongan rendah. Dimana keberhasilan dalam menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat golongan rendah dapat dilihat dari penurunan presentase penduduk di garis kemiskinan. Aspek kedua yaitu pemerataan pendapatan secara menyeluruh dengan mempersempit perbedaan tingkat pendapatan penduduk atau rumah tangga. Dimana kesuksesan dalam memperbaiki tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dapat dilihat apabila laju perkembangan pendapatan golongan rendah lebih besar dari laju perkembangan pendapatan golongan atas atau kaya.

Permasalahan dalam ketimpangan pendapatan sangat perlu diperhatikan dan diatasi. Menurut Todaro (2013) terdapat tiga jawaban kenapa kita perlu memperhatikan fenomena ketimpangan pendapatan yang ada, berikut diantaranya:

1. Ketimpangan pendapatan ekstrim dapat menimbulkan tidak efisiennya perekonomian
2. Ketimpangan pendapatan akan merusak kestabilan dan kebersamaan sosial
3. Ketimpangan pendapatan umumnya dilihat tidak adil

Di negara berkembang kemiskinan dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan masyarakat berpendapatan rendah merupakan suatu hal yang perlu diatasi. Tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan ini memiliki dampak negatif. Pada saat kemiskinan naik maka ketimpangan pendapatan akan meningkat juga (Nurlina,

2020). Selain hal di atas, pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat daerahnya telah mencapai taraf kehidupan yang baik dan dapat mengakses hasil pembangunan daerah tersebut. Ciri – ciri suatu daerah dikatakan berhasil dalam proses pembangunan manusia dapat diketahui berdasarkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan penjelasan dimana penduduk dapat menjangkau hasil dari pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dari perolehan pendapatan, pendidikan, dan kesehatan penduduk. Perbedaan IPM di setiap daerah menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah. Setiap wilayah mempunyai tingkatan pembangunan yang berbeda-beda maka dari itu dapat membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki keterkaitan dengan ketimpangan pendapatan (Pradnyadewi & Purbadharmaja, 2017). Tinggi rendahnya IPM dapat berakibat pada tatanan produktivitas penduduk. Apabila IPM suatu daerah rendah maka akan berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas penduduk, begitupun sebaliknya semakin tinggi IPM maka akan semakin tinggi tatanan produktivitas penduduk sehingga akan membuat tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi.

Masalah ketimpangan pendapatan merupakan penelitian yang sudah lama dilakukan oleh para peneliti. Penelitian Hipotesis U-terbalik atau penelitian pertama yang dilakukan Simon Kuznets tahun 1955, yang mengatakan bahwa pada mulanya pertumbuhan berdampak pada peningkatan ketimpangan pendapatan, tetapi sampai batas tertentu pertumbuhan ekonomi dapat membuahkan paritas. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa penelitian Kuznets yaitu tahapan peningkatan dan penurunan

ketimpangan pendapatan tidak dapat dihindari begitu saja, tapi itu semua terkait pada bagaimana pembangunan yang dilakukan oleh setiap Negara.

Istilah pembangunan ekonomi umumnya dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi berbagai negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu kriteria kesuksesan dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah, karena memperlihatkan bagaimana kegiatan perekonomian suatu wilayah yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila pertumbuhan ekonomi juga diikuti penurunan atau berkurangnya ketimpangan pendapatan.

Pelaksanaan program pembangunan ekonomi di Provinsi DI Yogyakarta sangat penting karena juga berperan penting terhadap sukses tidaknya pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi DI Yogyakarta dapat dikatakan stabil, tetapi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di provinsi lain masih tergolong rendah. Tabel berikut adalah laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut provinsi di Pulau Jawa tahun 2011 – 2020.

Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011 – 2020.

Provinsi	Laju Pertumbuhan PDRB									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DKI Jakarta	6.73	6.53	6.07	5.91	5.91	5.87	6.2	6.11	5.82	-2.36
Jawa Barat	6.5	6.5	6.33	5.09	5.05	5.66	5.33	5.65	5.07	-2.44
Jawa Tengah	5.3	5.34	5.11	5.27	5.47	5.25	5.26	5.3	5.4	-2.65
DI Yogyakarta	5.21	5.37	5.47	5.17	4.95	5.05	5.26	6.2	6.59	-2.69
Jawa Timur	6.44	6.64	6.08	5.86	5.44	5.57	5.46	5.47	5.52	-2.39
Banten	7.03	6.83	6.67	5.51	5.45	5.28	5.75	5.77	5.29	-3.38

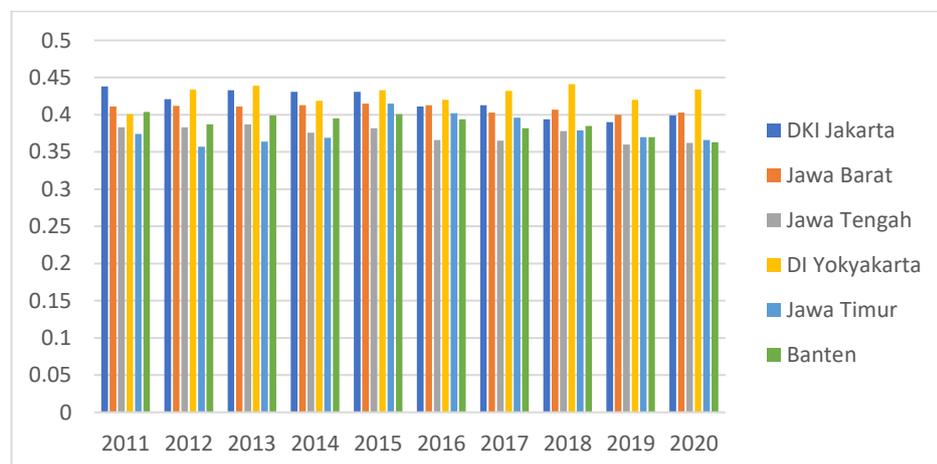
Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi DI Yogyakarta dapat dikatakan stabil, tetapi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di provinsi lain di Pulau Jawa masih tergolong rendah. Rata – rata laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun terakhir yaitu 4.66%. Laju pertumbuhan ekonomi di provinsi DI Yogyakarta menempati peringkat ke-5 dari 6 provinsi di Pulau Jawa. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan produk domestik regional bruto Provinsi DIY mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 6.59%. Angka ini juga melampaui angka pertumbuhan nasional 1% sebesar 5.02%. Secara sektoral hal ini dikarenakan pertumbuhan dari sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 14.39% dan seiring masih berjalannya proyek bandara dan beberapa fasilitas umum pada tahun 2019. Sementara pada tahun 2020 laju pertumbuhan pdrb Provinsi DIY mengalami kontraksi hingga anjlok sampai minus 2.69%. Hal ini tentu berasal dari dampak negatif Covid-19, dimana seluruh kegiatan perekonomian sulit bergerak bahkan tidak hanya di Provinsi DIY melainkan seluruh daerah dan negara di dunia juga mengalami penurunan yang drastis.

Ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah juga dapat diakibatkan karena perkembangan dan dependensi yang dimiliki oleh suatu daerah serta ketertinggalan akibat pembangunan yang hanya berpusat pada suatu daerah tertentu yang sudah maju. Ketimpangan pendapatan dapat diukur dengan koefisien gini atau indeks/rasio gini. Rasio gini adalah salah satu alat untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk dalam suatu daerah. Rasio gini atau indeks gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu daerah. Indeks gini mempunyai dasar teori yang kuat sebagai indeks normatif yang

dapat merepresentasikan teori kemiskinan relatif. Selain itu indeks gini juga dapat digunakan untuk menghitung pendapatan negatif dimana ini merupakan salah satu sifat yang tidak dimiliki oleh sebagian ukuran ketimpangan. Angka indeks gini berkisar 0-1. Apabila angka indeks gini bernilai 0 berarti termasuk dalam pemerataan sempurna sedangkan sebaliknya apabila angka indeks gini bernilai 1 berarti ketimpangan pendapatan sempurna terjadi. Jika indeks gini < 0.3 maka masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”, jika nilainya berkisar $0.3 - 0.5$ maka masuk dalam kategori ketimpangan “moderat/sedang”, apabila angka indeks gini nilainya > 0.5 maka termasuk dalam ketimpangan “tinggi”.

Ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki angka yang berkisaran sedang tetapi dikatakan belum merata. Diantara provinsi di Pulau Jawa, provinsi DI Yogyakarta menempati angka tertinggi selama 10 tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat pada grafik gambar di bawah.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1. Perbandingan Rasio Gini Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011 -2020

Berdasarkan grafik gambar diatas dapat dilihat bahwa ketimpangan pendapatan yang diukur dengan angka rasio gini menunjukkan bahwa di Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta menempati peringkat tertinggi diantar provinsi lainnya di Pulau Jawa. Ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini perlu diatasi, meskipun perekonomian di Provinsi DIY terus berkembang tetapi persoalan distribusi pendapatan belum merata. Menurut perhitungan indeks gini oleh Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2019 Provinsi DIY mencapai 0.423 dimana angka tersebut merupakan ketimpangan pendapatan terbesar di Indonesia. Bahkan selama periode 2015 – 2021, angka rasio gini Provinsi DIY lebih tinggi dibandingkan Indonesia (BPS, 2021). Apabila hal ini tidak ditangani maka akan berdampak buruk pada perekonomian di Provinsi DIY ke depannya. Sehingga perlu dilakukan analisa kondisi distribusi pendapatan antara golongan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa ketimpangan distribusi pendapatan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah persoalan yang cukup serius. Apabila persoalan ini tidak segera diatasi maka akan semakin melebar dan mengganggu proses pembangunan di Provinsi DIY. Oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Mediasi”**

1.2. Rumusan Masalah

Indikator keberhasilan dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan berkurangnya tingkat ketimpangan pendapatan suatu daerah. Masalah ketimpangan pendapatan perlu menjadi fokus utama dalam penanganan pembangunan ekonomi daerah. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki angka ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia. Meskipun laju pertumbuhan ekonomi provinsi DI Yogyakarta mengalami perkembangan yang fluktuatif, tetapi belum dibarengi dengan pemerataan distribusi pendapatan antar masyarakat daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Apakah Kemiskinan secara langsung berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara langsung berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah Kemiskinan secara langsung berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara langsung berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
5. Apakah Pertumbuhan Ekonomi secara langsung berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
6. Apakah Kemiskinan secara tidak langsung berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

7. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara tidak langsung berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Kemiskinan secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kemiskinan secara langsung terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara langsung terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi secara langsung terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Untuk mengetahui pengaruh Kemiskinan secara tidak langsung terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara tidak langsung terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup variabel ketimpangan pendapatan sebagai variabel terikat (*dependen*) berdasarkan nilai rasio gini di Provinsi DIY.

Variabel bebas atau *independent* yang digunakan adalah Kemiskinan yang ditinjau dari angka tingkat kemiskinan. Variabel bebas lainnya yaitu Indeks Pembangunan Manusia yang ditinjau dari angka IPM untuk melihat pemerataan pembangunan di suatu daerah.

Variabel mediasi atau *intervening* yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi yang ditinjau dari nilai PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 2010.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pembaca

Untuk para pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi pembangunan. Manfaat penelitian ini khususnya yakni diharapkan dapat melengkapi kajian ketimpangan pendapatan dengan mengungkap secara empiris berbagai faktor yang mempengaruhi, serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Bagi pengambil kebijakan

Bagi pengambil kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan, dan dapat dijadikan acuan untuk mengatasi

permasalahan ketimpangan pendapatan di suatu wilayah dalam mengambil kebijakan selanjutnya.